

Harian Nasional : Kompas Media Indonesia
 Seputar Indonesia
 (lainnya)
Harian Lokal : Radar Banten Kabar Banten
 Banten Raya Post Satelit News
 BANTEN POS (lainnya)
Hari/Tanggal : JUMAT 10 JULI 2015
Halaman Koran : 9 & 10

Mobil Mogok Kerja KI Terhambat

SERANG, BANPOS - Komisi Informasi (KI) Banten mengembalikan dua mobil dinas ke Pemprov Banten, karena sering mogok. Akibatnya, kinerja KI terhambat.

Mobil yang mogok itu itu adalah Toyota Kijang Super dan Mitsubishi Kuda.

Adapun spesifikasi mobil itu adalah jenis Kijang Super tahun pembuatan 2001, nopol A 1044, dengan 1.781 cc. Kedua jenis

Mitsubishi Kuda tahun pembuatan 2005.

Ketua KI Banten Maskur mengatakan, sejak komisioner dilantik 21 April 2015, dua mobil itu sudah ada di sekretariat. Kijang Super kondisinya sama sekali tidak bisa dipakai, sehingga sampai sekarang dibiarkan di kantor.

Sementara, jenis Mitsubishi Kuda masih bisa digunakan

► BACA MOBIL... HAL 10

Mobil Mogok.....

Sambungan dari Halaman 9

tetapi kondisinya tak laik pakai karena baru beberapa kilometer jalan, sudah mogok.

"Waktu kita roadshow ke media-media, mobil Kuda itu mogok. Bahkan harus kami dorong. Jadi sekarang praktis KI Banten tak punya mobil dinas untuk menunjang operasional, padahal para komisioner KI disetarakan dengan pejabat eselon 2. Meski demikian kami harus tetap bekerja dengan sarana yang ada," ujar Maskur.

Terkait kerusakan kendaraan dinas, kata dia, KI sudah melayangkan surat ke Biro Perlengkapan dan Aset Pemprov Banten agar ada penarikan dan penukaran dua mobil tersebut. Namun, sampai saat ini belum ada jawaban yang pasti. Bahkan ada beberapa pegawai Biro Perlengkapan dan Aset datang ke KI Banten membicarakan penggantian mobil itu.

"Pegawai itu bilang bahwa KI Banten akan diberi mobil jenis Suzuki Carry tahun 2005. Ini bukan solusi tetapi malah menambah masalah, karena kondisi mobil sudah tua," ujarnya.

Ia mengatakan, tak muluk-muluk soal mobdin, yang penting KI Banten punya mobil dinas yang laik dipakai untuk kegiatan sehari-hari. Apalagi kegiatan KI Banten cukup banyak, seperti kunjungan kerja, mengantarkan surat panggilan sidang ajudikasi, maupun koordinasi dengan instansi lain.(AEP)